

**KEBIJAKAN PENGHENTIAN DAN PELARANGAN PENEMPATAN  
PEKERJA MIGRAN PADA PENGGUNA PERSEORANGAN  
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA INDONESIA  
DI ARAB SAUDI**

Oleh  
**Henry Fitrawan<sup>1</sup> dan Ari Hernawan<sup>2</sup>**

**INTISARI**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia di Arab Saudi dalam kebijakan penghentian dan pelarangan serta untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia yang tetap berangkat ke Arab Saudi pada masa kebijakan penghentian dan pelarangan.

Jenis penelitian ini bersifat normatif empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi dokumen. Penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dari wawancara narasumber dengan pedoman wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif serta disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka hasil penelitian ini yang pertama adalah Pemerintah perlu mencegah para pekerja migran informal untuk tidak bepergian ke Arab Saudi secara non-prosedural dengan membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri atau meningkatkan kualitas pekerja migran melalui beasiswa pendidikan sehingga pekerja migran yang ditempatkan merupakan pekerja migran formal. Hasil Penelitian yang kedua adalah masih terdapat pekerja migran Indonesia yang berangkat bepergian ke Arab Saudi untuk menjadi PLRT. Hal tersebut terjadi karena masih ada kerjasama antara Calo dengan Satgas Pemberantasan Calo Penyalur Pekerja Migran untuk melakukan pengiriman pekerja migran dan tidak ada sanksi tegas kepada Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja yang masih melakukan pengiriman pekerja migran secara non-prosedural, namun Undang-Undang mewajibkan Pemerintah untuk selalu melindungi para pekerja migran tersebut.

**Kata Kunci: Penghentian dan Pelarangan, Penempatan Pekerja Migran,  
Pengguna Perseorangan, Perlindungan Hukum, Penata Laksana Rumah  
Tangga**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Pascasarjana pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

<sup>2</sup> Profesor Bagian Hukum Ketenagakerjaan pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

**POLICY FOR TERMINATION AND PROHIBITION OF MIGRANT  
WORKERS PLACEMENT IN PERSONAL USERS  
AS A LEGAL PROTECTION EFFORTS ON  
INDONESIA HOUSEHOLD ASSISTANT  
IN SAUDI ARABIA**

**By  
Henry Fitrawan<sup>3</sup> and Ari Hernawan<sup>4</sup>**

**ABSTRACT**

The purpose of this study was to find out and review the legal protection of the Indonesian Housekeepers in Saudi Arabia in the policy of cessation and prohibition and to know and analyze the legal protection of Indonesian Migrant Workers who continue to go to Saudi Arabia during the policy of termination and prohibition.

This type of research is empirical normative. Normative research is conducted by library research to obtain secondary data obtained from primary and secondary legal materials by means of document studies. Empirical research was conducted with field research to obtain primary data from interviewees with guidance from interviews. The collected data was analyzed qualitatively and presented in descriptive analytical form.

Based on the results of research conducted by the author, the first results of this study are the Government needs to prevent informal migrant workers from traveling to Saudi Arabia non-procedurally by opening jobs in the country or improving the quality of migrant workers through educational scholarships so that migrant workers placed are formal migrant workers. The second research result was that there were still Indonesian migrant workers who traveled to Saudi Arabia to become Household Assistant. This happens because there is still cooperation between the Brokers and the Task Force on the Eradication of Migrant Workers Brokers for sending migrant workers and there are no strict sanctions to recruitment agencies that still send migrant workers in a non-procedural manner, but the Act requires the Government to always protect these migrant workers.

**Keywords: Termination and Prohibition, Migrant Workers Placement, Personal Users, Legal Protection, Household Assistant**

---

<sup>3</sup> Post Graduate Student, Faculty of Law, Gadjah Mada University.

<sup>4</sup> Professor of Labour Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University.